

INDONESIA'S
FOLU
NET SINK
2030

BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

OUTLINE



**1. PENGANTAR BIDANG
PENGLOLAAN HUTAN LESTARI**



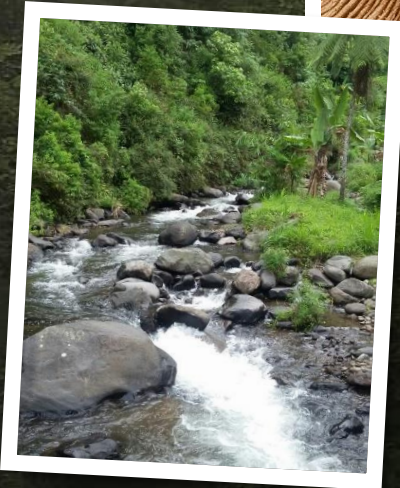
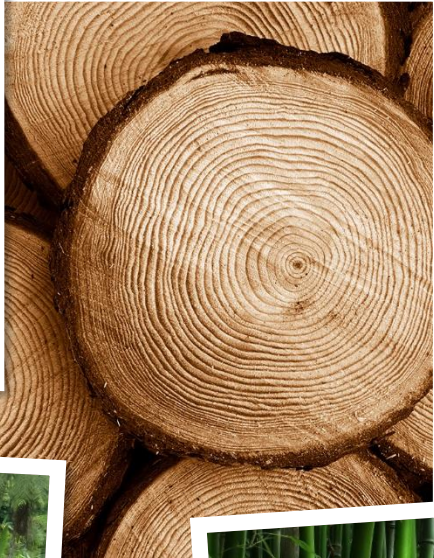
**2. TARGET DAN RENCANA KERJA
KELOMPOK KERJA 1.1**



**3. TARGET DAN RENCANA KERJA
KELOMPOK KERJA 1.2**

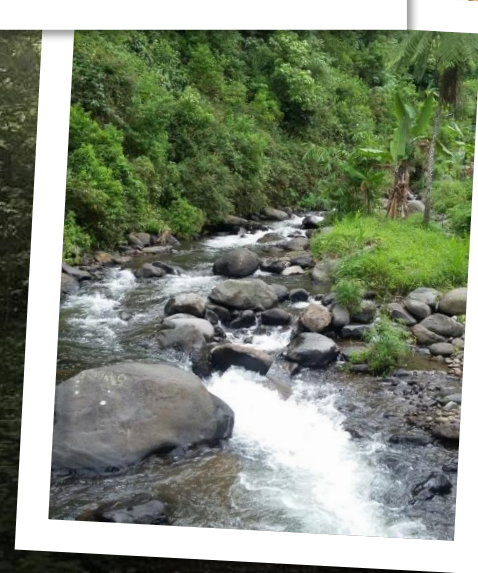


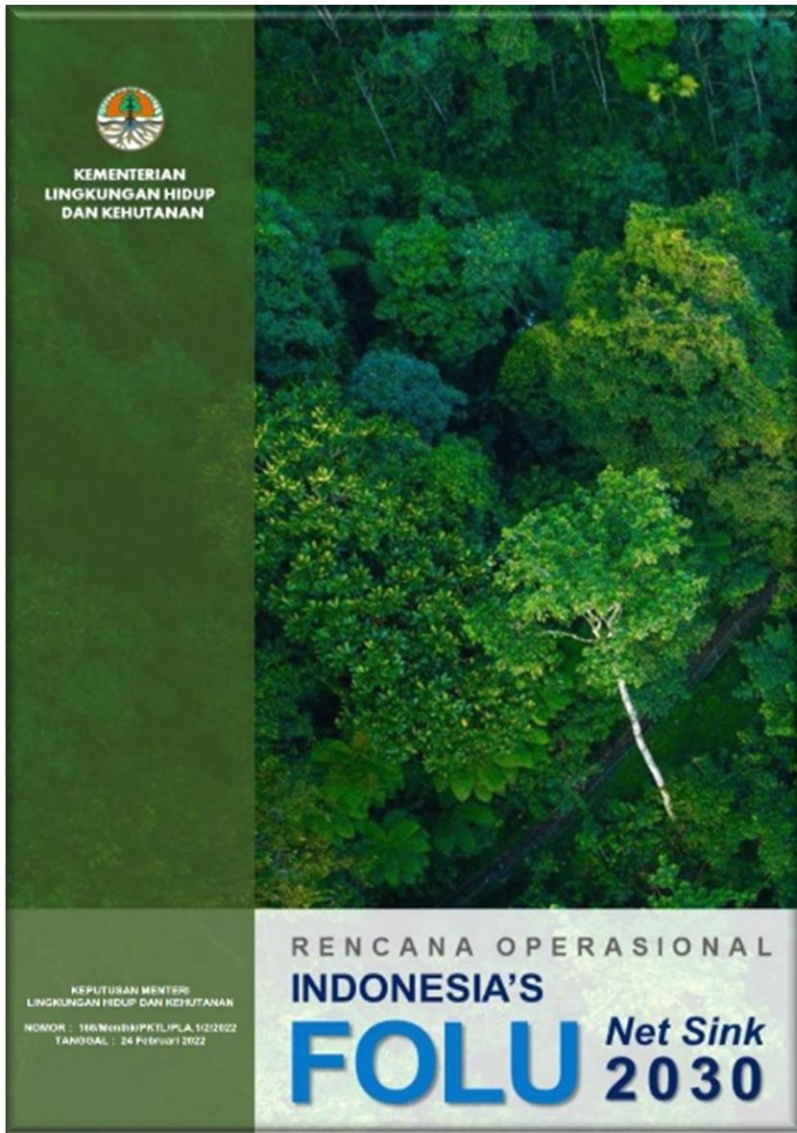
**4. TARGET DAN RENCANA KERJA
KELOMPOK KERJA 1.3**



1

**PENGANTAR
BIDANG
PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI**





SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar **-140 juta ton CO₂e pada tahun 2030**, mendukung *net zero emission* sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR.

Ruang Lingkup Indonesia FOLU Net Sink 2030

1

Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral

2

Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut dan Mangrove

3

Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral

4

Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut dan Mangrove

5

Pembangunan Hutan Tanaman

6

Pengelolaan Hutan Lestari

7

Rehabilitasi Dengan Rotasi

8

Rehabilitasi Non Rotasi

9

Restorasi Gambut dan Perbaikan Tata Air Gambut

10

Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang

11

Konservasi Keanekaragaman Hayati

12

Perhutanan Sosial

13

Pengembangan dan pematapan Hutan Adat

14

Introduksi Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian

15

Pengawasan dan *law enforcement* dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

TUGAS BIDANG 1 PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Ketua Bidang I:

Ir. Istanto, M.Sc, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

POKJA 1.1 **Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan**

- a. melaksanakan penyusunan manual/*guidelines*, melaksanakan implementasi dan monitoring dan pencatatan serta evaluasi **pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan**;
- b. memantapkan sistem paralegal bagi Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Adat;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.

POKJA 1.2 **Perhutanan Sosial**

- a. melaksanakan penyusunan manual/*guidelines*; implementasi dan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi perhutanan sosial;
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.

POKJA 1.3 **Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi**

- a. melaksanakan penyusunan manual/*guidelines*; implementasi, monitoring dan pencatatan serta evaluasi operasional PHL kegiatan **penerapan teknik RIL, teknik PHL, pemulihan kawasan dan penegakan hukum, pengelolaan PBPH**;
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.



Tenaga Ahli Bidang 1 Pengelolaan Hutan Lestari

Bidang PHL

- Dr. Omo Rusdiana;
- Nana Rusyana;
- Teguh Prawira;

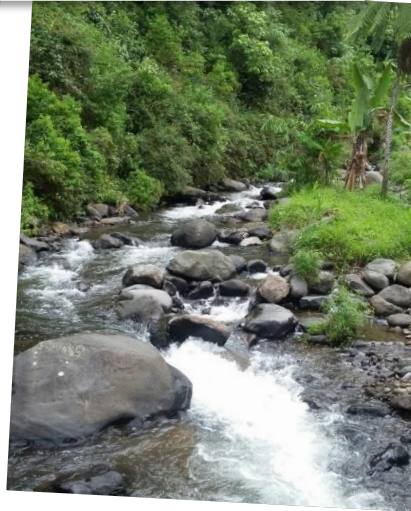
Bidang Karhutla

- Prof. Lailan Syaufina;
- Dr. Nitya Ade Santi;
- M. Hudzaifah Rihuljihad, S.Hut;
- Atfi Indriyani Putri, S.Hut.

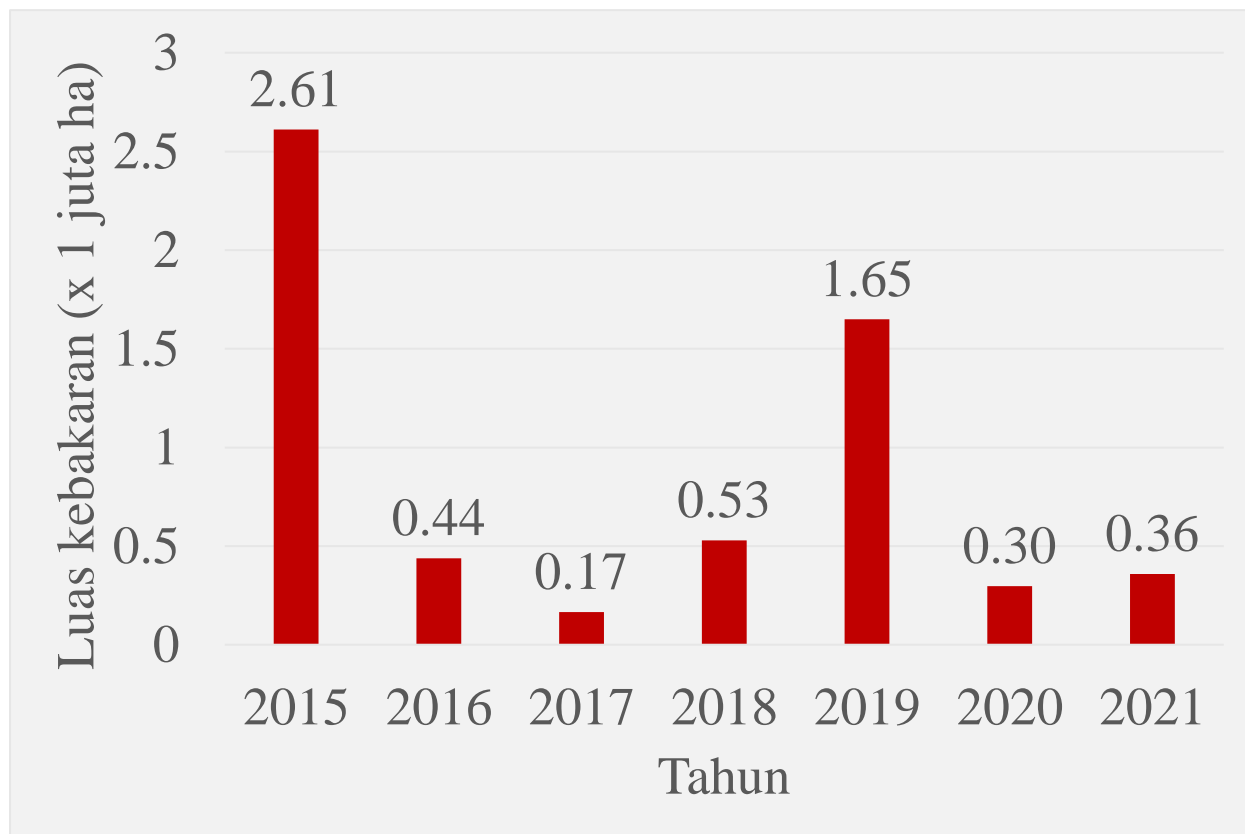


2

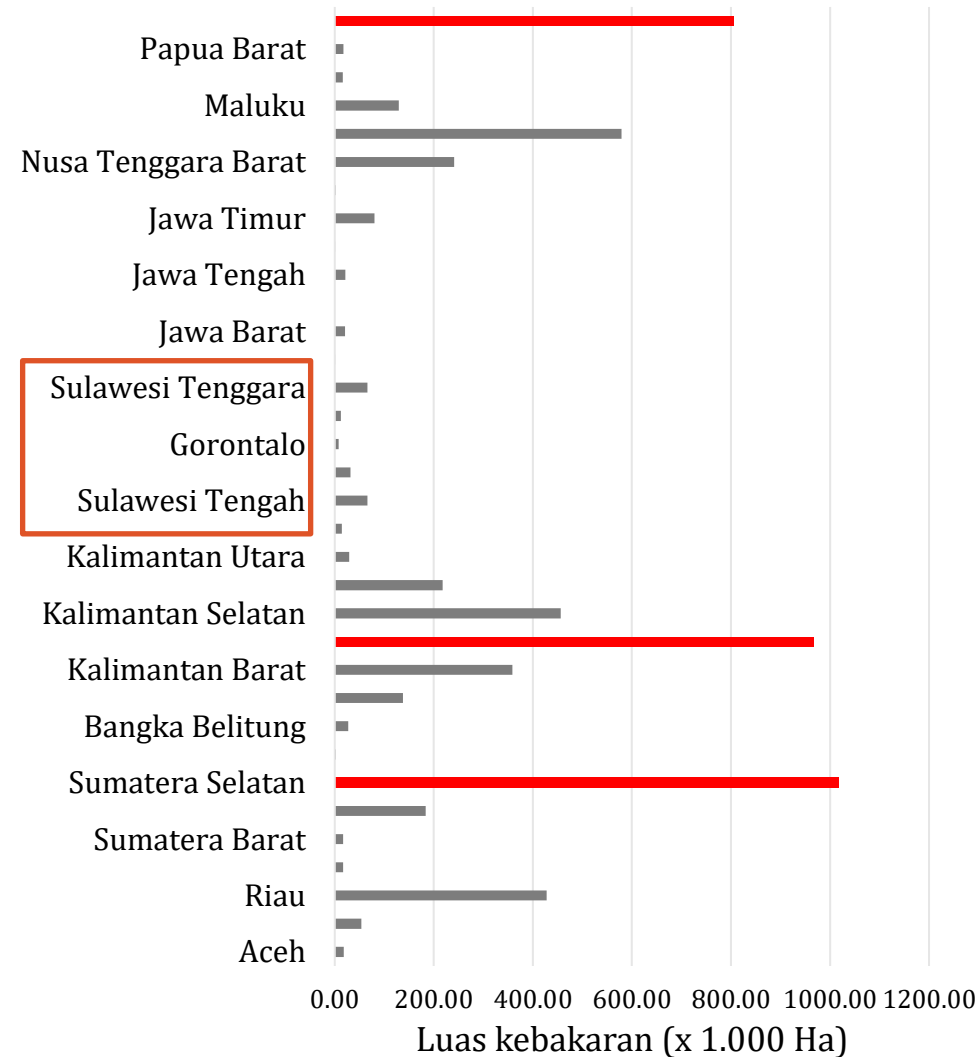
TARGET DAN
RENCANA KERJA
KELOMPOK
KERJA 1.1



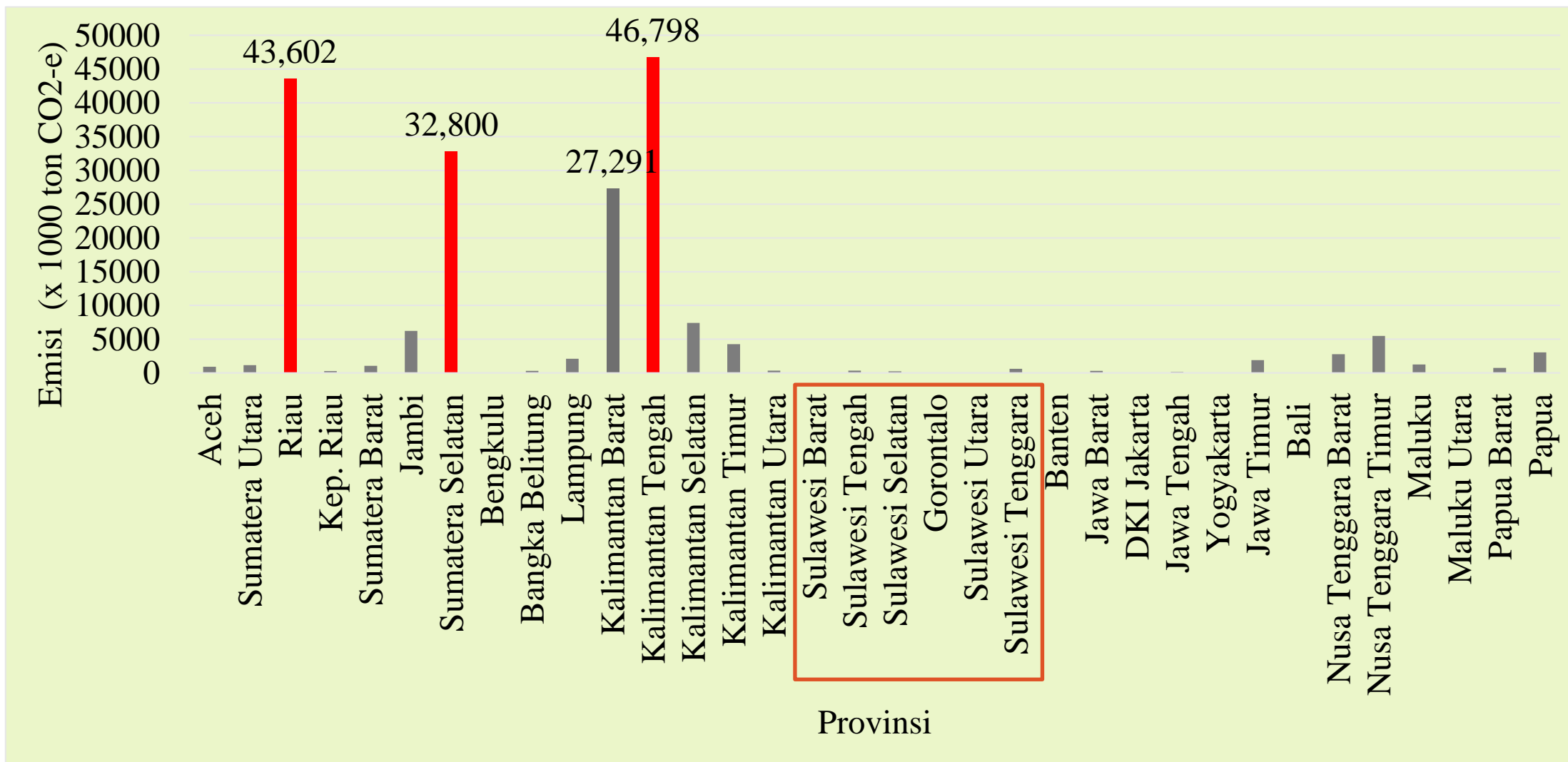
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Luas karhutla periode 2015-2021 (sumber: KLHK 2022)



RATA-RATA EMISI CO2 DARI KARHUTLA PERIODE 2017-2021



PRIORITAS DARKATHUTLA REGION SULAWESI

No	Provinsi	Kerawanan Kebakaran (ha)				Total Tinggi- Sangat Tinggi
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Sulawesi Tengah	1.165.627	2.589.309	1.912.702	373.373	2.286.075
2	Sulawesi Selatan	855.269	1.723.980	1.941.336	2.013	1.943.349
3	Sulawesi Tenggara	611.560	1.171.017	1.700.146	182.200	1.882.346
4	Sulawesi Barat	142.636	389.714	822.918	327.847	1.150.765
5	Sulawesi Utara	171.343	393.480	666.733	240.089	906.822
6	Gorontalo	138.272	364.294	536.849	172.555	709.404
	TOTAL					8.878.761

PRIORITAS PENGENDALIAN KARHUTLA DI LAHAN GAMBUT

No	Luas Gambut	Kelas	Kelas Prioritas	Provinsi
1	>1 Juta hektar	P1	Prioritas 1	Riau, Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Papua Barat
2	<1 Juta hektar	P2	Prioritas 2	Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu
3	0 hektar (non gambut)	P3	Prioritas 3	Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan , Maluku Utara, Maluku, DI Yogyakarta, DKI Jakarta

LOKASI PRIORITAS PENGENDALIAN KARHUTLA

No	Luas Area Terbakar	Kelas	Kelas Prioritas	Provinsi
1	$P1 \geq 600.000$	P1	Prioritas 1	Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Papua
2	$300.000 \leq P2 < 600.000$	P2	Prioritas 2	Riau
3	$P3 < 300.000$	P3	Prioritas 3	Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara , Jawa Timur, Sulawesi Selatan , Bangka-Belitung, Kalimantan Utara, Aceh, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo , Kepulauan Riau, Bengkulu, Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta

**PRIORITAS LOKASI PENGENDALIAN KARHUTLA BERDASARKAN
PRIORITAS LAHAN GAMBUT DAN DATA AKTUAL KARHUTLA**

Kebakaran	Gambut	Provinsi
P1	P1	Sumatera Selatan; Kalimantan Tengah; Papua
P2	P1	Riau
P3 ($< 300k$ Ha)	P1	Papua Barat
	P2	Kalimantan Selatan; Kalimantan Barat; Kalimantan Timur; Jambi; Lampung; Sumatera Utara; Bangka Belitung; Kalimantan Utara; Aceh; Sumatera Barat; Kepulauan Riau; Bengkulu; NTT
	P3 (non gambut)	Maluku; NTB; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara ; Jawa Timur, Sulawesi Selatan ; Maluku Utara; Jawa Barat; Jawa Tengah; Sulawesi Barat; Sulawesi Utara; Gorontalo ; Bali; Banten; DIY; DKI Jakarta

TUGAS & RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.1

JENIS INTERVENSI	RINCIAN KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN		
			2022	2023	2024
KEBIJAKAN DAN REGULASI	1	Penyusunan manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan			
	2	Implementasi manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan			
	3	Memantapkan sistem paralegal bagi Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Adat			
	4	Pelaporan pelaksanaan kegiatan			
TEKNOLOGI	5	Deteksi dan peringatan dini			
	6	Penyiapan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan berbasis ICT			
	7	Monitoring, pencatatan, serta evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan berbasis ICT			
	8	Penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat dan udara didukung peningkatan sarana dan prasarana			
	9	Penanganan pasca kebakaran			

JENIS INTERVENSI	RINCIAN KEGIATAN		TAHUN PELAKSANAAN		
			2022	2023	2024
KEMITRAAN	14	Penyiapan dan implementasi Program dan Strategi Komunikasi Publik			
	15	Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi			
	16	Penyiapan dan Pengembangan kemitraan para pihak			
	17	Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat			
	18	Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait			
	19	Operasi bidang penanganan bencana			
ANGGARAN	20	Penyusunan dan Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran			
	21	Penyiapan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan			

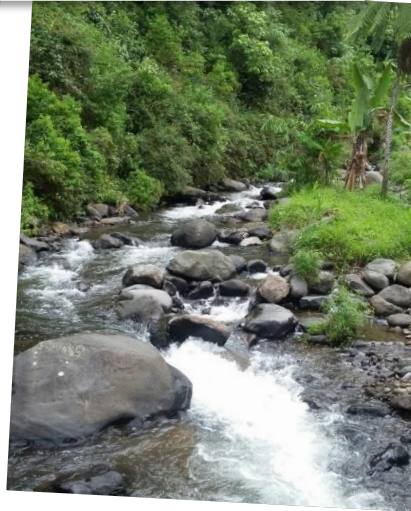
PENDANAAN PENGENDALIAN KARHUTLA

- Rencana pendanaan dalkarhutla untuk areal dengan tingkat kerawanan sangat tinggi dan tinggi seluas **16,39 juta hektar** dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp.174,25 trilyun** atau **10 % dari total APBN Indonesia TA 2021**;
- Anggaran KLHK tahun 2021 sebesar Rp 3,56 trilyun didalamnya ada dana untuk “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” sebesar Rp 2,74 trilyun.
- Alternatif insentif anggaran program dan kegiatan dalkarhutla:
 - Semua dana hibah perubahan iklim dimasukkan dalam APBN untuk disalurkan melalui BPD LH;
 - Dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 mekanisme insentif melalui DID (Dana Insentif Daerah) untuk daerah yang melakukan konservasi atau penurunan emisi; dan
 - Dalam PP 98 Tahun 2021 semua pendanaan perubahan iklim melalui *focal point* Pemerintah (KLHK).



3

TARGET DAN
RENCANA KERJA
KELOMPOK
KERJA 1.2



Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Mendukung IFNET2030 - Bidang PHL

Distribusi Akses legal Perhutanan Sosial 12,7 juta Ha sampai tahun 2028



Penambahan pendamping sebanyak 25.000 sampai tahun 2030



Pembentukan KUPS sebanyak 45.200 sampai tahun 2030



Terbentuknya percontohan IAD, paling sedikit di 1 kabupaten/provinsi



Terbentuknya pengembangan usaha tematik paling sedikit 1 lokasi/provinsi



Meningkatnya kelas KUPS



Meningkatnya Kontribusi menjaga ekologi sesuai target FOLU NET SINK 2030





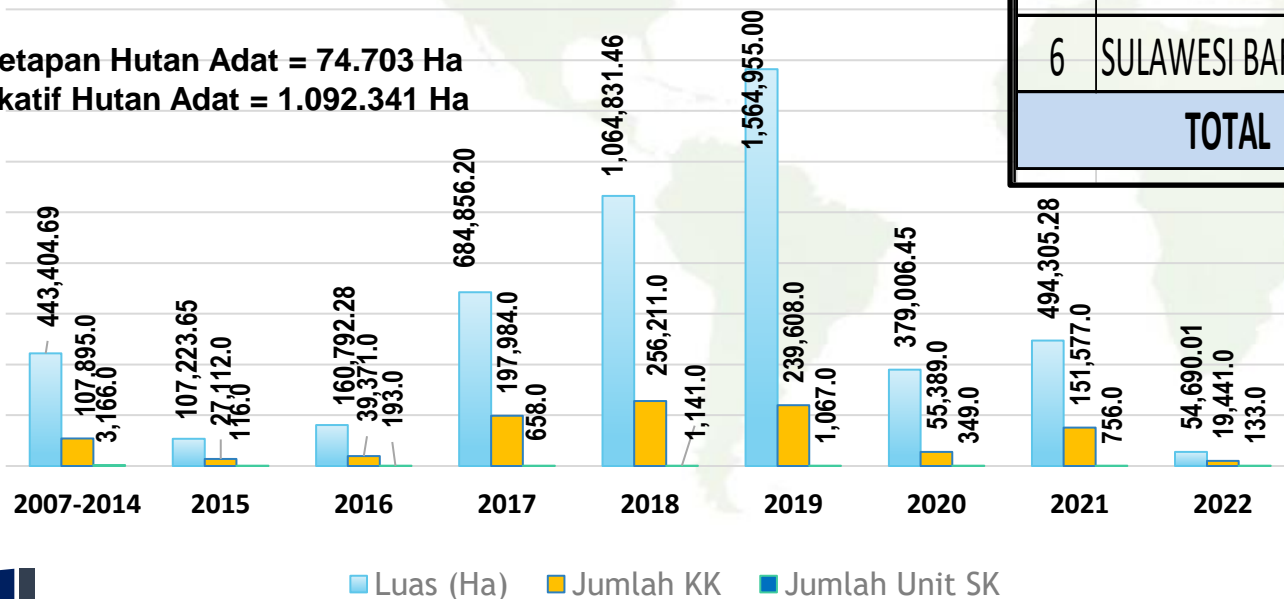
CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL SAMPAI DENGAN 13 JUNI 2022

Realisasi per Skema

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	1,947,292.21
2	HKM	891,939.74
3	HTR	355,185.08
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	557,814.20
	B. IPHPS	34,789.79
5	HA*)	1,167,044.00
JUMLAH		4,954,065.02

- *)
- Penetapan Hutan Adat = 74.703 Ha
 - Indikatif Hutan Adat = 1.092.341 Ha

Realisasi per Tahun



NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK
		Alokasi	Capaian		
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)		
1	SULAWESI UTARA	124.034	40.073,35	220	5.178
2	SULAWESI TENGAH	429.096	229.982,55	1.251	31.441
3	SULAWESI SELATAN	450.740	316.707,14	675	68.376
4	SULAWESI TENGGARA	291.991	102.226,33	303	21.871
5	GORONTALO	59.521	24.597,01	152	14.512
6	SULAWESI BARAT	113.342	47.197,82	471	6.313
TOTAL		1.468.724	760.784,20	3.072	147.691

REALISASI

4.954.065,02 Ha
± 1.094.588 KK
7.579 Unit SK
Ijin/Hak

TARGET & RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.2

Aksi Mitigasi Pengayaan Hutan (Enhanced Natural Regeneration, ENR)

Target ENR-PIAPS	Kondisi Saat ini	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Biaya (Rp) Indikatif (x1000)
					2022	2023	2024	
13.070,49 Ha	7.721,55 Ha <i>(Indikatif PS)</i>	Percepatan distribusi akses legal PS	Luas prakondisi persetujuan PS dalam skema HD, HKm, HTR, KK	Ha	100	200	200	800.000
			Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Ha	100	200	200	
		Pengembangan usaha PS	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	KUPS	-	2	3	1.500.000
			Fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	KUPS	-	2	3	
			Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum	KUPS	-	2	3	
		Percepatan pendampingan PS	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Orang	-	2	3	600.000
			Kemitraan Kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan	SK	-	2	3	
		Penanganan Konflik tenurial, HA	Penanganan Kasus Konflik Tenurial	Kasus	-	1	1	640.000
	Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak		SK	-	pm	pm		
	5.348,93 Ha 164 KPS <i>(PS Definitif)</i>	Pengembangan usaha PS	Rencana Kelola PS yang disahkan	KUPS	-	7	-	2.100.000
			Fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	KUPS	-	7	-	
			Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum	KUPS	-	7	-	
		Percepatan pendampingan PS	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Orang	-	7	-	840.000
			Kemitraan Kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan	SK	-	2	-	
Konflik tenurial		Penanganan Kasus Konflik Tenurial	Kasus	-	2	-	1.280.000	
		JUMLAH					7.760.000	

TARGET & RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.2

Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman

Target Hutan Tanaman – PIAPS	Kondisi Saat ini	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Biaya (Rp) Indikatif (x1000)
					2022	2023	2024	
7.327,12 Ha	7.327,12 Ha 33 KPS (PS Definitif)	Pengembangan perhutanan sosial	Rencana Kelola PS yang disahkan	KUPS	-	15	15	9.400.000
			Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	KUPS	-	15	15	
			Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum	KUPS	-	15	15	
		Percepatan pendampingan perhutanan sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Orang	-	15	15	3.600.000
			Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	SK	-	5	5	
		Penanganan Konflik tenurial	Penanganan Kasus Konflik Tenurial	Kasus	-	5	5	3.000.000
				JUMLAH				

TARGET & RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.2

Aksi Mitigasi Reduce Impact Logging -Carbon (RIL-C)

Target RIL-C-PIAPS	Kondisi Saat ini	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Biaya (Rp) Indikatif (x1000)
					2022	2023	2024	
2.936,88 Ha	863,75 Ha <i>(Indikatif PS)</i>	Percepatan distribusi akses legal PS	Luas prakondisi persetujuan PS dalam skema HD,HKm, HTR,KK	Ha	100	200	200	800.000
			Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Ha	100	200	200	
		Pengembangan usaha PS	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	KUPS	-	2	3	1.500.000
			Fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	KUPS	-	2	3	
			Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum	KUPS	-	2	3	
		Percepatan pendampingan PS	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Orang	-	2	3	600.000
			Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	SK	-	2	3	
		Penanganan Konflik tenurial, HA	Penanganan Kasus Konflik Tenurial	Kasus	-	1	1	640.000
			Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	SK	-	pm	pm	
		2.073,12 Ha 69 KPS <i>(PS Definitif)</i>	Pengembangan usaha PS	Rencana Kelola PS yang disahkan	KUPS	-	7	-
	Fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan			KUPS	-	7	-	
	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/ Platinum			KUPS	-	7	-	
	Percepatan pendampingan PS		Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Orang	-	7	-	840.000
			Kemitraan Kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan	SK	-	2	-	
Konflik tenurial	Penanganan Kasus Konflik Tenurial		Kasus	-	2	-	1.280.000	
		JUMLAH					7.760.000	

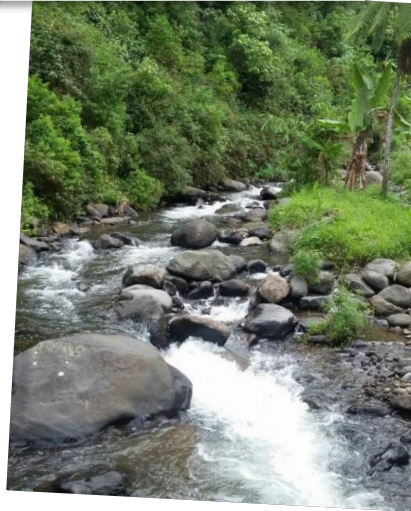
RENCANA PELAPORAN DAN MONEV KELOMPOK KERJA 1.2

KEGIATAN	PEMANTAUAN DAN EVALUASI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda batas ▪ RKPS - Ruang Perlindungan dan Ruang Pemanfaatan ▪ RKPS dan rencana bisnis ▪ Implementasi Agroforestry ▪ Pasar regional dan nasional ▪ Role Model HLN ▪ Kemitraan Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. goKUPS harian (real time) 2. Monitoring minimal 6 bulan sekali 3. Evaluasi tahunan dan 5 tahunan 4. Evaluasi insidental
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reguler (berdasarkan permohonan) ▪ Kerja Bareng Jemput Bola (Jareng Jebol) dan Vertek Online ▪ Role Model HLN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. goKUPS harian (real time) 2. Monitoring Karhutla Harian 3. Evaluasi tahunan dan 5 tahunan 4. Evaluasi insidental
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reguler (rekrutmen, seleksi dan penetapan) ▪ Peningkatan Kapasitas ▪ Forum Pendampingan antar K/L ▪ Apresiasi ▪ Pengembangan Mitra Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. goKUPS harian (real time) 2. Monitoring minimal 6 bulan sekali 3. Evaluasi tahunan 4. Evaluasi insidental
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assessment ▪ Advokasi ▪ Negosiasi ▪ Mediasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pada saat proses penanganan 2. Monitoring pasca kesepakatan

1. Meningkatnya luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS
2. Meningkatnya kelas KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas GOLD/PLATINUM
3. Meningkatnya jumlah kemitraan kelompok PS dan kemitraan lingkungan
4. Meningkatnya jumlah tenaga pendamping PS
5. Meningkatnya penyelesaian kasus konflik tenurial
6. Meningkatnya penetapan hutan adat dan hutan hak
7. Meningkatnya jumlah rencana kelola PS yang disahkan
8. Meningkatnya jumlah fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan

4

**TARGET DAN
RENCANA KERJA
KELOMPOK
KERJA 1.3**



AKSI MITIGASI

❑ Degradasi Hutan Konsesi

Pada area konsesi, sebagian area masih banyak berupa hutan alam primer. Pencegahan degradasi hutan primer menjadi sekunder pada area konsesi hutan merupakan salah satu aksi mitigasi.

❑ RIL-C

Kegiatan RIL-C diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya masih hutan primer yang masuk arahan produksi

❑ SILIN

Penerapan SILIN termasuk kegiatan ENR (*enhanced natural regeneration*) karena dapat meningkatkan produktifitas hutan alam sampai 3–4 kali lipat dari produktifitas saat ini atau setara dengan 90–120 m³/ha/daur.

❑ Pembangunan Hutan Tanaman

- ✓ Lokasi prioritas untuk meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri dalam memenuhi kebutuhan kayu industri dengan mengurangi ketergantungan terhadap hutan alam pada area konsesi PBPH-HT dan area PIAPS yang masuk ke dalam arahan IJLH produksi.
- ✓ Pelaksanaan pembangunan hutan tanaman ialah pada area tidak produktif yang berada pada arahan produksi.
- ✓ Pembangunan Hutan Tanaman juga dapat berupa hutan alam dan restorasi ekosistem.



Sebaran PBPH di Regional Sulawesi

No	Provinsi	PBPH HA		PBPH HT	
		(Unit)	(Ha)	(Unit)	(Ha)
1	Sulawesi Utara			1	7.500,00
2	Gorontalo			2	74.147,78
3	Sulawesi Tengah	7	368.066,00	2	73.320,00
4	Sulawesi Barat	1	30.525,00	1	10.600,00
5	Sulawesi Tenggara			3	54.280,00
6	Sulawesi Selatan			2	21.430,00
	Jumlah	8	398.591,00	11	241.277,78

A. PENGENDALIAN DEGRADASI HUTAN KONSESI

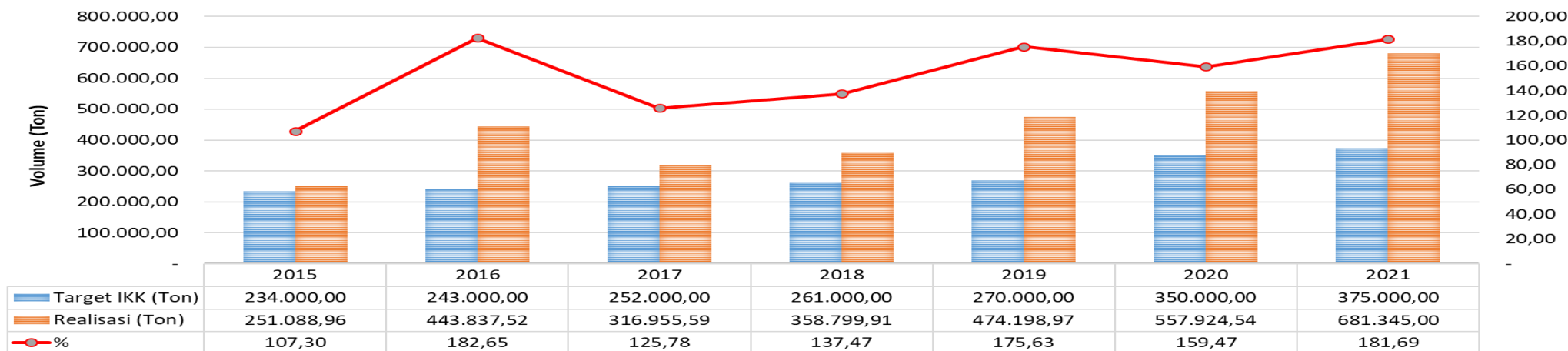
Provinsi	PBPH HT	PBPH HA	TOTAL (ha)
	Planned Degradation	Planned Degradation	Planned Degradation
Gorontalo	425	-	425
Sulawesi Barat	10	4.778	4.788
Sulawesi Tengah	54.295	59.035	113.330
Sulawesi Tenggara	16.427	-	16.427
Sulawesi Utara	159	7.882	8.041
Total (Ha)	71.316	71.695	143.011

Terdapat areal seluas **71.316 Ha** di PBPH-HT dan **71.695 Ha** di PBPH-HA yang perlu dikendalikan dari potensi degradasi terencana di regional Sulawesi, yang sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Produksi HHBK , pemulihan lingkungan
2	Pengembangan sertifikasi PHL	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer masuk arahan lindung berdasarkan IJLH
3	Pengembangan sistem insentif bagi pencegahan degradasi hutan primer	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer masuk arahan produksi berdasarkan IJLH

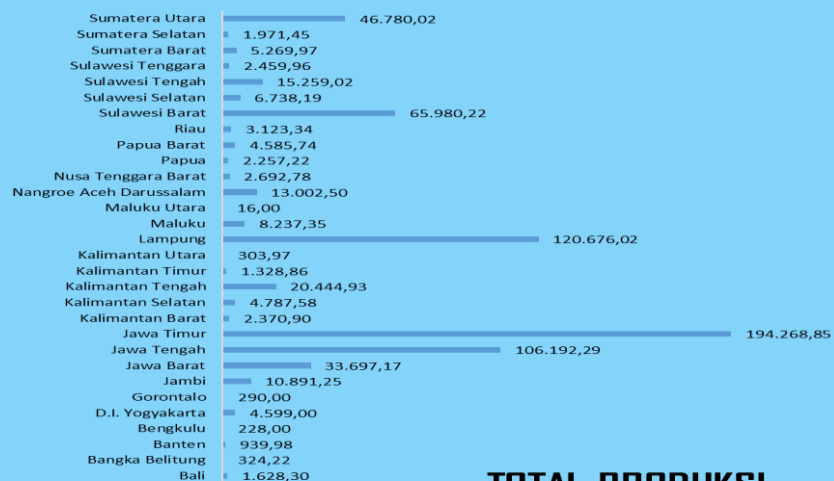
PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

REALISASI PRODUKSI HHBK (TON) 2015-2021



GRAFIK CAPAIAN PRODUKSI HHBK PADA TAHUN 2021 :

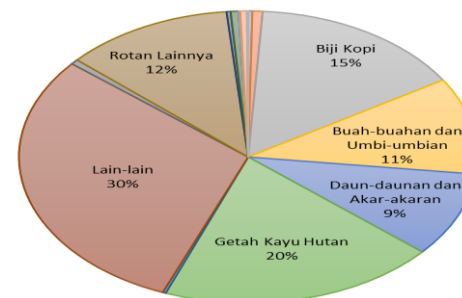
PRODUKSI HHBK PER PROVINSI TAHUN 2021 (TON)



TOTAL PRODUKSI
681.345 TON

(Sumber: Satu Data Ditjen PHL)

PRODUKSI PER KEL.HHBK (TON)



Produksi komoditas HHBK pada Tahun 2021 paling banyak berasal dari Provinsi **Jawa Timur sebesar 194.268,85 Ton** (Jawa) dan **Lampung sebesar 120.676,02 Ton** (luar Jawa) dengan komoditas didominasi oleh Kel. **Lain-lain (Tebu dan hasil Agroforestry (30%)** dan paling tinggi diproduksi oleh Perhutani sebesar **337.028 Ton**.



Luas Area pada Upaya Aksi Mitigasi “Degradasi Konsesi (Terencana)” di Area PBPH-HT

Provinsi dan Nama PBPH-HT	Luas Menurut Indeks Prioritas Lokasi			Luas Total (Ha)
	2	3	4	
Gorontalo		425		425
PT GORONTALO CITRA LESTARI		425		425
Sulawesi Barat		10		10
PT BARA INDOCO		10		10
Sulawesi Tengah	51.352	2.188	757	54.297
PT BERKAT HUTAN PUSAKA			54	54
PT COLTAN AGRO	16.760			16.760
PT ECOGREEN RESOURCES		2.179		2.179
PT HUTAN LANGGENG LESTARI	200			200
PT INDOKARET			703	703
PT KILAU ALAM LESTARI		9		9
PT RIMBA ELOK LESTARI	2.421			2.421
PT WANA RINDANG LESTARI	31.971			31.971
Sulawesi Tenggara	16.427			16.427
PT DENVHI NURANESIA RAYADIPTA	10.757			10.757
PT INDO SUNSHINE LESTARI	5.670			5.670
Sulawesi Utara			158	158
PT KAWANUA KAHURIPAN PANTERA			158	158

Luas Area pada Upaya Aksi Mitigasi “Degradasi Konsesi” di Area PBPH-HA

Provinsi dan Nama PBPH-HA	Indeks Prioritas Lokasi	Luas Total (Ha)
	2	
Sulawesi Barat	24.913	24.913
PT SULWOOD EKSPORT DEVELOPMENT	362	362
PT ZEDSKO PERMAI	24.551	24.551
Sulawesi Tengah	169.422	169.422
PT BINA BALANTAK RAYA	47.115	47.115
PT DAHATAMA ADI KARYA	16.531	16.531
PT PASURUAN FURNINDO INDS	23.351	23.351
PT RIU MAMBA KARAYA SENTOSA	6.688	6.688
PT SATYAGUNA SULAJAYA	9.134	9.134
PT SENTRAL PITULEMPA	15.343	15.343
PT SULWOOD EKSPORT DEVELOPMENT	16.277	16.277
PT TAMAN HUTAN ASRI	25.284	25.284
PT TRI TUNGGAL EBONI	9.699	9.699
Sulawesi Utara	10.563	10.563
PT HUMA SULUT LESTARI	10.563	10.563

B. PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Provinsi	NDC-CM1 dan Net sink LTS		
	PHL (PBPH HT)	PSKL (KPHP- PIAPS)	TOTAL (Ha)
Gorontalo	10.832	6.580	17.411
Sulawesi Barat	3.303	492	3.795
Sulawesi Selatan	2.352	9.519	11.871
Sulawesi Tengah	14.788	13.053	27.841
Sulawesi Tenggara	10.031	28.406	38.437
Sulawesi Utara	704	3.221	3.925
Total (Ha)	42.010	61.271	103.280

Lahan tidak produktif untuk perluasan tanaman dalam kawasan PBPH HT di Region Sulawesi seluas 42.010 Ha, sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan	Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll)
		Optimalisasi Pembangunan HT (Percepatan Pembangunan HT Pada Lahan Berkonsesi)
		Peningkatan Produktivitas HT
		Penyusunan Rencana dan Laporan Monev Pembangunan HT Kajian dan Penelitian mengenai pembangunan HT
2	Pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE)	Penyusunan roadmap/review/revisi percepatan pengembangan THE pada PBPH sebanyak 9 roadmap hingga tahun 2030
		Fasilitasi percepatan pengembangan HTE pada PBPH (sosialisasi, pembangunan demplot, integrasi industri) sebanyak 22 PBPH hingga tahun 2030. Terdapat 31 unit PBPH yang telah mendukung HTE dengan realisasi 12.059 Ha, Perhutani 28.377 Ha dan KPH seluas 50 Ha (Sumut)
		Fasilitasi dan Pembinaan/Penguatan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari
		Peningkatan Kapasitas, Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH di KPH dan Monitoring Evaluasi pada 160 KPH hingga tahun 2030

PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN ENERGI



Indonesia memiliki setidaknya 8 sumber energi terbarukan (biofuel, **biomassa**, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut).

Sumber Biomassa

Bahan berligoselulosa : Kayu, bambu, rotan, termasuk limbah

Wood pellet, arang, kayu bakar, biooil

Buah / Biji : Nyamplung, Jarak, Kemiri Sunan, Kepuh, Malapari, Aren

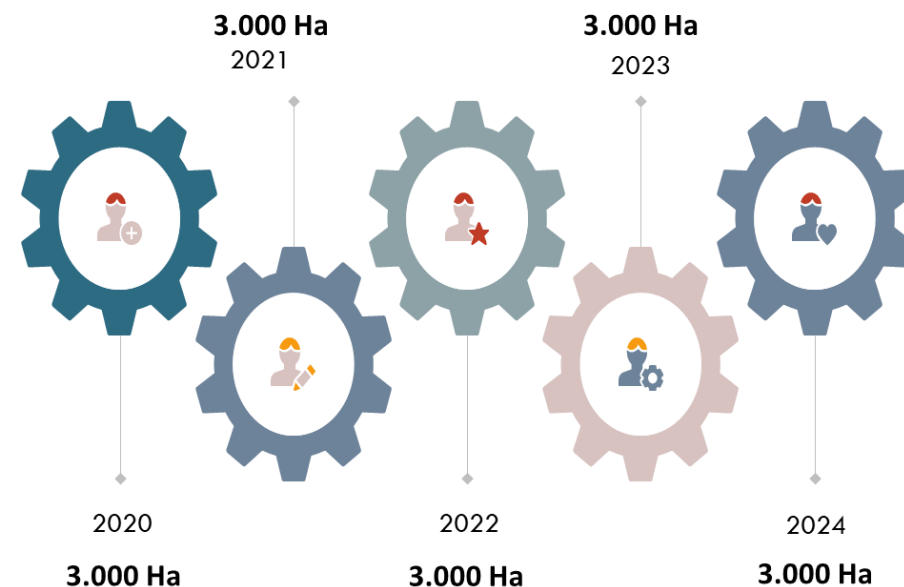
Biodiesel, Biethanol

Tahun 2020-2024 target luas usaha pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi sebesar 15.000 Ha

Terdapat 31 unit IUPHHK-HTI dan Perum Perhutani yang telah mendukung pembangunan HTE

- 13 IUPHHK-HTI – Telah **mengalokasikan areal untuk Energi** : 142.172 ha
- 18 IUPHHK-HTI – Telah **berkomitmen untuk Energi**

Perum Perhutani **mengalokasikan untuk Energi 67.000 Ha** (realisasi tanaman s/d 2021 : 28.377 Ha)



C. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

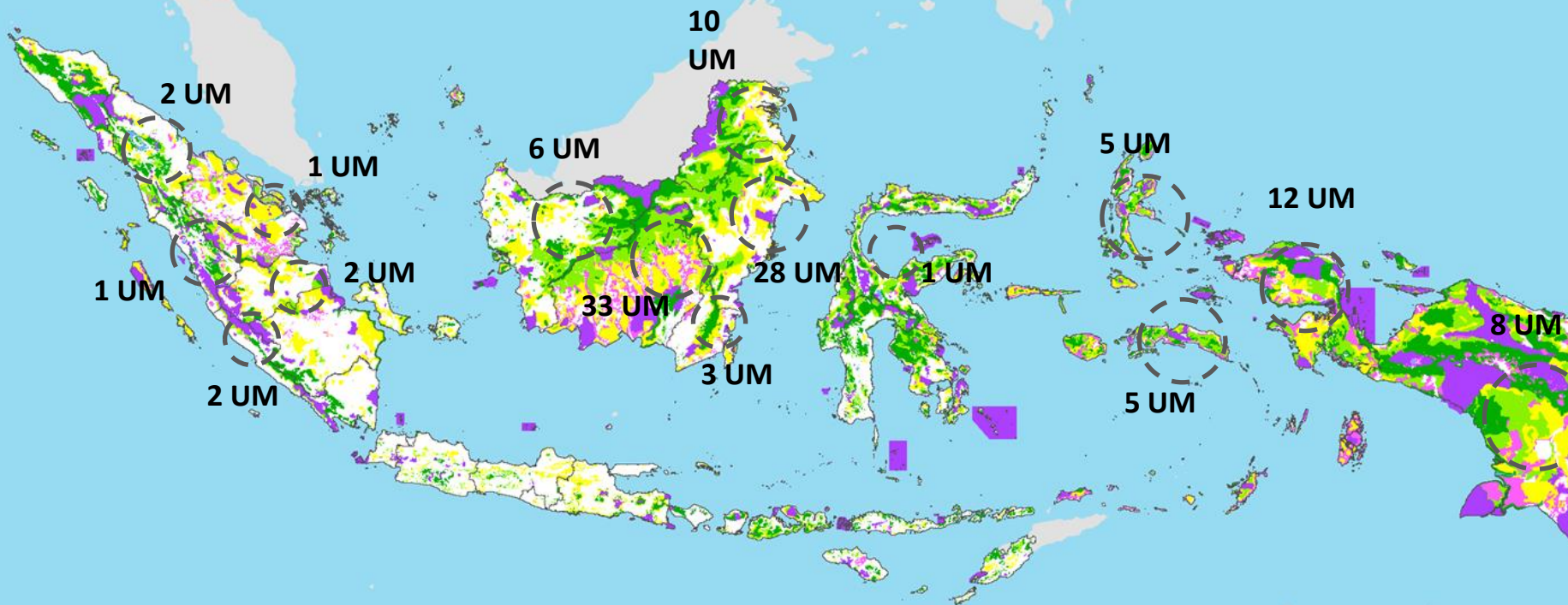
PROVINSI	FOLU NET-SINK	
	RIL-C	PHL
Gorontalo		142
Sulawesi Barat		1.596
Sulawesi Tengah		37.777
Sulawesi Tenggara		5.476
Sulawesi Utara		2.680
Total (Ha)		47.671

- Target RIL-C PBPH-HA regional Sulawesi seluas 47.671 Ha dengan sebaran terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Tidak ada target SILIN PBPH-HA di regional Sulawesi.

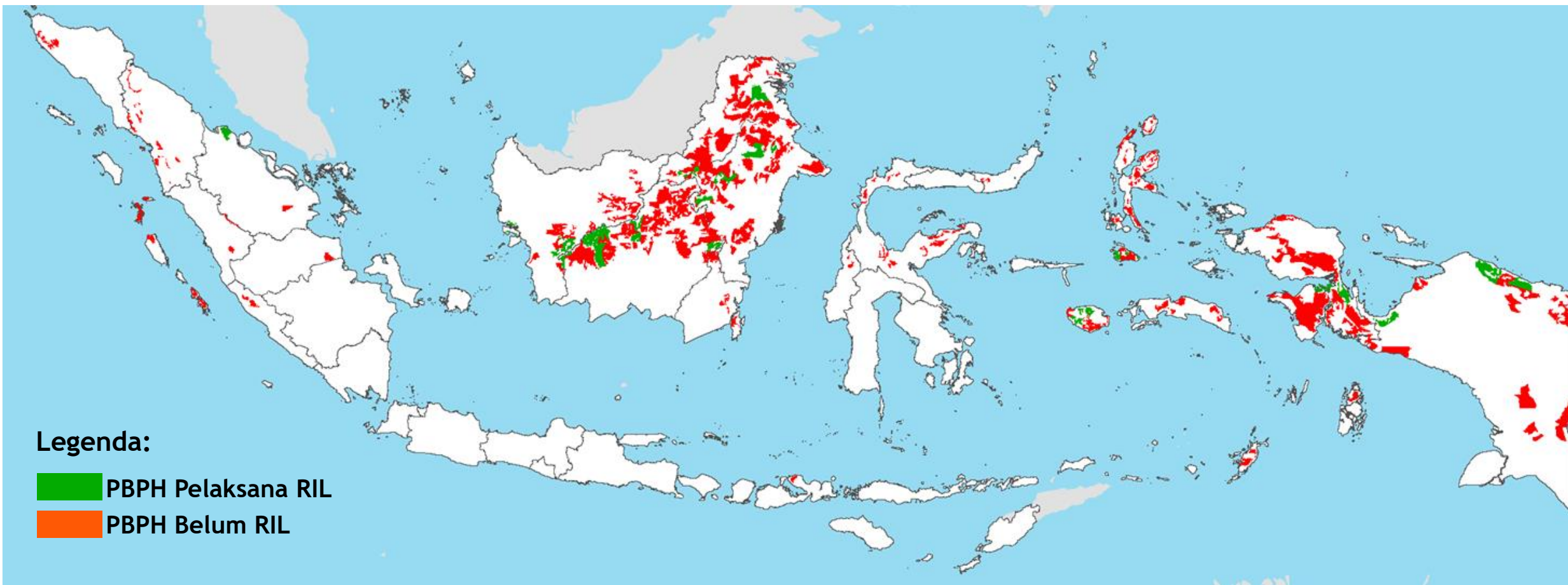
Provinsi dan Nama PBPH-HA	Luas Menurut IPL	Luas Total (ha)
	2	
Sulawesi Barat	4.778	4.778
PT ZEDSKO PERMAI	4.778	4.778
Sulawesi Tengah	59.038	59.038
PT DAHATAMA ADI KARYA	8.147	8.147
PT PASURUAN FURNINDO INDS	22.803	22.803
PT RIU MAMBA KARAYA SENTOSA	6.668	6.668
PT SATYAGUNA SULAJAYA	4.558	4.558
PT SENTRAL PITULEMPA	1.768	1.768
PT SULWOOD EKSPORT DEVELOPMENT	5.939	5.939
PT TAMAN HUTAN ASRI	251	251
PT TRI TUNGAL EBONI	8.904	8.904
Sulawesi Utara	7.880	7.880
PT HUMA SULUT LESTARI	7.880	7.880

PBPH YANG MENERAPKAN TEKNIK SILIN

1. Teknik SILIN telah diterapkan di 119 unit PBPH (s.d Juni 2022).
2. Realisasi tanaman 1999 - Juni 2022 seluas 164.730 ha.
3. Sebaran Pelaksana SILIN:
 - a. Kaltim 28 UM
 - b. Kaltara 10 UM
 - c. Kalbar 6 UM
 - d. Kalteng 33 UM
 - e. Kalsel 3 UM
 - f. Sulteng 1 UM
 - g. Sumut 2 UM
 - h. Sumbar 1 UM
 - i. Bengkulu 2 UM
 - j. Maluku 5 UM
 - k. Malut 5 UM
 - l. Papua 8 UM
 - m. Papua Barat 12 UM.
 - n. Riau 1 UM
 - o. Jambi 2 UM



PBPH PELAKSANA RIL



RIL 31 unit
(63.789,40 Ha)

Belum RIL
220 unit



251
Unit PBPH

RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.3

No	Rincian Kegiatan ¹	Tujuan ¹	Output ²	Indikator Kinerja ³	Target ³	Tahun ³			Indikatif Anggaran (xRp 1.000.000,-)
						2022	2023	2024	
A. KEBIJAKAN DAN REGULASI									
1	Penyusunan manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH								
1.1.	Penyusunan manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (bibit/benih unggul, multiusaha, SK FOLU menjadi diperhatikan dalam SK PBPH)	1. Tersusunnya manual/guidelines teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (dokumen)	1	1			500
				Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi SILIN di area PBPH (dokumen)	1	1			500
				Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (dokumen)	1	1			500
				Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi degradasi konsesi di area PBPH (dokumen)	1	1			500
1.2.	Penyusunan roadmap multiusaha	Tersusunnya roadmap multiusaha	2. Tersusunnya roadmap multiusaha	Tersusunnya roadmap multiusaha (dokumen)	1		1		800
1.3.	Penyusunan NSPK KPH Efektif	Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU	3. Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU	Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU (dokumen)	1		1		1.000
1.4.	Penyusunan roadmap HTE	Tersusunnya roadmap HTE	4. Tersusunnya roadmap HTE	Tersusunnya roadmap HTE (dokumen)	1		1		500
1.5.	Penyusunan NSPK NEK bidang PHL	Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL	5. Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL	Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL (dokumen)	1	1			800
JUMLAH									5.100



RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.3

No	Rincian Kegiatan ¹	Tujuan ¹	Output ²	Indikator Kinerja ³	Target ³	Tahun ³			Indikatif Anggaran (xRp. 1.000.000,-)
						2022	2023	2024	
2	Implementasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH								
2.1. Sosialisasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersosialisasikannya manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	6. Meningkatkan jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL (unit manajemen)	196		147	196	2.000	
			7. Jumlah pemegang PBPH yang menerapkan SILIN meningkat	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan SILIN (unit manajemen)	435		326	435	2.000
				10. Meningkatkan riap/produktivitas tegakan	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang melakukan pembangunan hutan tanaman (unit manajemen)	240		181	241
			Bertambahnya luas hutan tanaman (ribu ha)		479		312	479	10.000
			12. Penggunaan benih/bibit unggul oleh PBPH sesuai kajian pakar dalam manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik PHL, pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menggunakan bibit bersertifikat (unit manajemen)	241		181	241	4.000
				13. Jumlah PBPH pelaksana RKUPH FOLU Net Sink 2030 meningkat	Meningkatnya jumlah PBPH yang mengintegrasikan RKUPH dengan kegiatan FOLU Net Sink 2030 (unit manajemen)	439	391	423	439
			Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan jadwal/rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya (unit manajemen)		351	176	263	351	800
Jumlah								21.100	

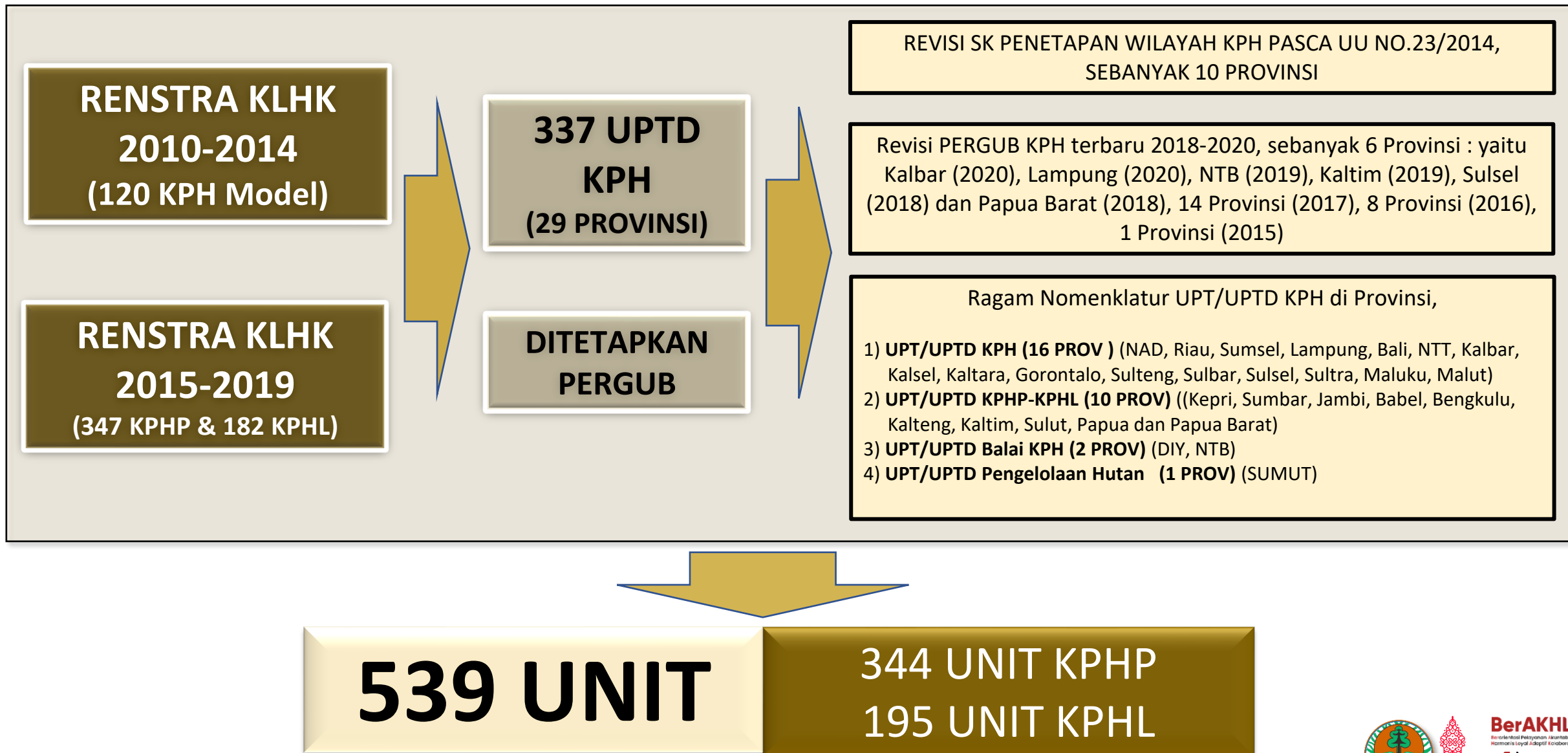
RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.3

No	Rincian Kegiatan ¹	Tujuan ¹	Output ²	Indikator Kinerja ³	Target ³	Tahun ³			Indikatif Anggaran (xRp. 1.000.000,-)
						2022	2023	2024	
2.2.	Sosialisasi roadmap multiusaha	Tersosialisasikannya roadmap multiusaha	14. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan multiusaha	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan multiusaha (unit manajemen)	220	132	176	220	2.000
			15. Terbitnya investasi baru PBPH multiusaha	Terbitnya investasi baru PBPH multiusaha (jumlah izin baru)	200	120	160	200	1.000
2.3.	Sosialisasi roadmap HTE	Tersosialisasikannya roadmap HTE	16. Jumlah PBPH HTE meningkat	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH-HT yang menanam hutan tanaman dengan jenis tanaman energi (unit manajemen)	241		181	241	3.000
2.4.	Sosialisasi NSPK KPH Efektif	Tersosialisasikannya NSPK KPH Efektif	17. Meningkatnya jumlah KPH efektif	Tersusunnya dokumen NSPK KPH Efektif (dokumen)	1		1		800
				Terlaksananya kegiatan penilaian KPH Efektif (kegiatan)	150	80	130	150	800
				Meningkatnya jumlah KPH efektif (unit)	60	30	45	60	800
2.5.	Penyusunan kriteria indikator pilot project PBPH FOLU Net Sink	Tersusunnya kriteria indikator pilot project PBPH FOLU Net Sink, Terbentuknya pilot project PBPH FOLU Net Sink	18. Tersusunnya kriteria indikator pilot project PBPH FOLU Net Sink	-					1.000
			19. Terbentuknya pilot project PBPH FOLU Net Sink	-					1.000
2.6.	Penyusunan kriteria indikator pilot project KPH FOLU Net Sink	Tersusunnya kriteria indikator pilot project KPH FOLU Net Sink, Terbentuknya pilot project KPH FOLU Net Sink	20. Tersusunnya kriteria indikator pilot project KPH FOLU Net Sink	-					1.000
			21. Terbentuknya pilot project KPH FOLU Net Sink	-					2.000
2.7.	Penyusunan Model Pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH	Tersusunnya Model pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH	22. Model pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH	-					1.500
JUMLAH									14.900

RENCANA KEGIATAN KELOMPOK KERJA 1.3

No	Rincian Kegiatan ¹	Tujuan ¹	Output ²	Indikator Kinerja ³	Target ³	Tahun ³			Indikatif Anggaran (xRp 1.000.000,-)
						2022	2023	2024	
3	Pelaporan pelaksanaan kegiatan								
3.1.	Penyusunan manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (bibit/benih unggul)	23. Tersusunnya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (dokumen)	1		1		1.000
				Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi SILIN (dokumen)	1		1		1.000
				Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (dokumen)	1		1		1.000
				Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (dokumen)	1		1		1.000
3.2.	Sosialisasi manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersosialisasikannya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	24. Persentase PBPH yang berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi mitigasi dalam FOLU Net Sink 2030 di area konsesinya meningkat	Persentase PBPH yang berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi mitigasi dalam FOLU Net Sink 2030 di area konsesinya (% unit manajemen)	80	40	65	80	2.000
				25. Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan kegiatan aksi mitigasi dalam FOLU Net Sink 2030 di area konsesinya	Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan kegiatan aksi mitigasi dalam FOLU Net Sink 2030 di area konsesinya (unit manajemen)	439	407	423	439
JUMLAH									8.000

MODALITAS KELEMBAGAAN KPH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030



KPH dan **BPHP** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PBPH yang telah melakukan penanaman tahun 2023 di lokasi target Net Sink.

KPH dan Dinas LHK Provinsi bersinergis dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada upaya aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman.

Bappenas, Kemendagri, Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, Pemda Provinsi, Dinas LHK Provinsi bersinergis dalam:

- Mendorong upaya perlindungan hutan dengan kerangka pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Penguatan peran pengelolaan hutan di KPH
- Ditjen KSDAE & Ditjen PSKL mendampingi KPH dalam implementasi perlindungan kawasan hutan, sebagai upaya mengurangi ancaman degradasi di area konsesi.

KPH, PBPH dan Ditjen PHL bersinergis dalam:

- Koordinasi terkait dengan integrasi RPHJP dan RPHJPd di KPH dan RKUPH di PBPH dengan lokasi target Rencana FOLU Net Sink 2030 pada upaya mitigasi implementasi RIL-C & SILIN di area PBPH-HA & PBPH-HT.
- Menyusun rencana dan metode pemantauan dan evaluasi pada area target pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari di area PBPH-HA dan PBPH-HT



G20
INDONESIA
2022

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TERIMA KASIH